PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH

Analisis Terhadap Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992

Prof. Dr. Subardjo, SH. M.Hum.

**PEMILIHAN LANGSUNG
KEPALA DAERAH**

Kutipan Pasal 72:

**Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 19 Tahun 2002)**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, S.H., M.Hum.

PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH

PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH

©2011 oleh Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, S.H., M.Hum.

Hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada Penulis.

Hak penerbitan ada pada Penerbit Markumi Lintas Pustaka Yogyakarta.

Penulis

Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, S.H., M.Hum.

Editor

TIM

Desain Sampul

TIM

Layouter

TIM

Cetakan I, Agustus 2011

Diterbitkan oleh:

Markumi Lintas Pustaka

Jl. KH. Ali Maksum 377 Krapyak Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 6874768/ 413860

Website: www.markumi.com

Email: penerbit@markumi.com

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit Markumi Lintas Pustaka, Redaksi Buku

Pemilihan Langsung Kepala Daerah/ Redaksi Penerbit

Markumi Lintas Pustaka – Yogyakarta 2011.

Hlm.92, 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-602-97061-8-5

I. Hukum

I. Judul

PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH

©2011 oleh Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, S.H., M.Hum.

Hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada Penulis.

Hak penerbitan ada pada Penerbit Markumi Lintas Pustaka Yogyakarta.

Penulis

Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, S.H., M.Hum.

Editor

TIM

Desain Sampul

TIM

Layouter

TIM

Cetakan I, Agustus 2011

Diterbitkan oleh:

Markumi Lintas Pustaka

Jl. KH. Ali Maksum 377 Krapyak Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 6874768/ 413860

Website: www.markumi.com

Email: penerbit@markumi.com

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit Markumi Lintas Pustaka, Redaksi Buku

Pemilihan Langsung Kepala Daerah/ Redaksi Penerbit

Markumi Lintas Pustaka – Yogyakarta 2011.

Hlm.92, 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-602-97061-8-5

I. Hukum

I. Judul

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
A. Pendahuluan	7
B. Rumusan Masalah	18
C. Pendekatan	19
D. Kerangka Teori	19
E. Pembahasan dan Perbandingan serta Urgensi Pemilihan Langsung Kepala Daerah	35
F. Kesimpulan	83
Daftar Pustaka	87
Dokumen Resmi	89
Tentang Penulis	91

PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keberadaan negara Republik Indonesia yang

termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, oleh para perumus pembentukan negara Republik Indonesia. Soekarno selaku proklamator ditetapkan sebagai Presiden Pertama oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dan selanjutnya digantikan Soeharto sebagai Presiden kedua melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966. Pemerintah Indonesia di era keduanya bercorak sentralistik dalam hubungan pusat dengan daerah. Konstitusi negara yakni UUD 1945 yang mestinya menjadi acuan hidup negara dimanipulasi dan rekayasa sedemikian rupa untuk kepentingan *status quo*. Sentralisasi pemerintah pusat dengan mengeksploitasi kekayaan alam daerah-daerah sangat merugikan daerah yang mengakibatkan daerah tidak berdaya untuk kesejahteraan, mencerdaskan dan memberikan keadilan sosial rakyatnya. Keadaan demikian tentu bertolak belakang dari tujuan dibentuknya negara. Ironisnya praktek sentralisasi dilakukan dengan mengatasnamakan negara melalui Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”

MARKUMI
LINTAS PUSTAKA

Penerbit
Markumi Lintas Pustaka
Jl. KH. Ali Maksum 377 Krapyak Yogyakarta
Telp./ Fax: (0274) 6874768/ 413860
Email: penerbit@markumi.com
Web: www.markumi.com

ISBN 978-602-97061-8-5

9 786029 706185